



# TAHUN 2021



## REVIU Indikator Kinerja Utama IKU PENGADILAN AGAMA BANGGAI



### PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 082262510405

e-mail: [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)/[banggai.pa@gmail.com](mailto:banggai.pa@gmail.com)

Website: [pa-banggai.go.id](http://pa-banggai.go.id)

 @AgamaBanggai

 @pa.banggai\_official

 PA BANGGAI

 @Pengadilan.Agama.Banggai

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN AGAMA BANGGAI



### PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah,  
Kabupaten Banggai Laut

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 0822

e-mail: [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)/[banggai.pa@gmail.com](mailto:banggai.pa@gmail.com)

website: [pa-banggai.go.id](http://pa-banggai.go.id)



## **PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI NOMOR : W19-A8/145/OT.01.3/1/2022**

#### **Tentang**

#### **PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

##### **KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

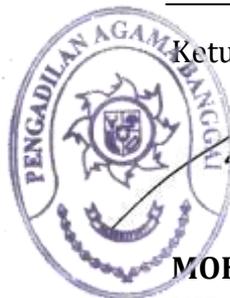
- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021

- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 Penetapan Reviu Undikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai tanggal 7 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Banggai agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai Laut  
pada tanggal 18 Januari 2022



Ketua Pengadilan Agama Banggai

**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**

NIP. 19811214 200704 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera Dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Tepat Waktu</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p> <p>Catatan : •</p>		
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan : •</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan : •</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan : •</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p align="center"><b>Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b></p> <p align="center"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<p align="center"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \quad \mathbf{100\%}</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p align="center"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \quad \mathbf{100\%}</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**NOMOR : W-A8/124/OT.01.2/1/2022**  
**TENTANG**  
**REVISI TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai dibentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama tahun 2022;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas- tugas dimaksud.
- c. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2025 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022.**
- Kesatu : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W-A8/518/OT.01.2/7/2021, tanggal 06 Juli 2021, dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan

diganti dengan keputusan Nomor : W19-A8/124/OT.01.2/1/2021, tanggal 7 Januari 2022.

- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022;
- Ketiga : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai;
- Keempat : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan di : Banggai,  
Pada tanggal : 7 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Banggai



**Mohamad Adam, S.H.I.**  
NIP. 19811214.200704.1.001

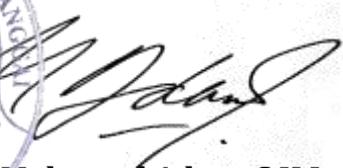
LAMPIRAN I : Revisi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Banggai Tentang Tim Penyusun Reviu Indikator  
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai  
Tahun 2022.

NOMOR : W-A8/124/OT.01.2/1/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

**REVISI DAFTAR TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022.**

No.	Nama / Nip	Jabatan		
		Pangkat	Kedinasan	Tim
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Adam, S.H.I. Nip. 19811214.200704.1.001	Pembina, IV/a	Ketua	Pengarah
2.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin S.E.I. NIP. 19840828.200904.2.012	Penata Tk I, III/d	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Sabrin, S.Ag NIP. 19731005.200212.1.005	Penata Tk I, III/d	Sekretaris	Sekretaris
4.	Syamsul Ilmi, S.H.I.,M.H NIP. 19890913 201712 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Hakim	Anggota
5.	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I NIP. 19950409 201712 2 003	Penata Muda, III/a	Hakim	Anggota
6.	Dra. Hj. Aisyah Nip. 19621115 199203 2 002	Penata Tk I, III/d	Panitera	Anggota
7.	Muhammad Saleh, S.H.I. NIP. 19811215 200904 1 007	Penata Tk I, III/d	Panmud Hukum	Anggota
8.	Maswati Masruni, S.H. NIP.19800528 200312 2 004	Penata Tk I, III/d	Panmud Gugatan	Anggota
9.	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H NIP. 19820508 200912 1 001	Penata, III/c	Panmud Permohonan	Anggota
10.	Syahrani R. Tiloli, S.H. NIP. 19860731 200904 2 004	Penata Tk I, III/d	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
11.	Pahlawanto, S.IP NIP. 19821115 201504 1 001	Penata Muda, III/a	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12.	Amelia Ivana Dewi, S.T NIP. 19960301 202012 2 004	Penata Muda, III/a	CPNS	Anggota
13.	Ricky Apriansyah, A. Md NIP. 19950405 202012 1 005	Pengatur, II/c	PNS	Anggota

Ketua,  
  


**Mohamad Adam, S.H.I.**  
NIP. 19811214.200704.1.001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SEBELUM REVIU**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dimediasi .	Perbandingan antara mediasi yang didaftar dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Hakim mediator/Mediator dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)	Majelis Hakim dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diputus dengan salinan putusan/penetapan dan atau akte cerai b. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan salinan putusan/penetapan dan atau akte cerai.	Majelis Hakim dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan

2.	Peningkatan aksesibilitas putusan	<p>Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Banding</li> <li>➤ Kasasi</li> <li>➤ peninjauan kembali</li> </ul>	Perbandingan antara jumlah putusan dan laporan bulanan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya Majelis Hakim dan laporan	Majelis Hakim	laporan bulanan dan laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali yang di sampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung	Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera	laporan bulanan dan laporan
		c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan relas yang dilaksanakan atau disampaikan kepada para pihak oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum disidangkan	Paniter dan Jurusita/Jurusita Pengganti	laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Prosentase penyitaan bulanan tepat waktu dan laporan	Perbandingan antara perkara tempat dimintakan penyitaan dengan yang sudah dilaksanakan penyitaan	Paniter dan Jurusita/Jurusita Pengganti	laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Perbandingan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan dan Panitera	laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to	a. Prosentase Prodeo Diselesaikan.	Perbandingan antara Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo secara keseluruhan.	Majelis Hakim dan Panitera.	laporan bulanan dan laporan tahunan.

		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats.	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaats dengan jumlah perkara yang harus	Majelis Hakim dan Panitera.	laporan bulanan dan laporan
		c. Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum	Perbandingan jumlah perkara yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum.	Majelis Hakim dan Panitera.	laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA Nomor 144 Th 2007 tentang keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Kepaniteraan.	laporan bulanan dan laporan tahunan.
5.	Meningkatnya bulanan kepatuhan laporan terhadap putusan tahunan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum	Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yg ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.	Ketua Pengadilan dan Panitera	laporan bulanan dan laporan tahunan.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang	Ketua Pengadilan dan Panitera.	laporan buku register pengaduan.
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris.	Register Pengawasan dan Pengaduan.



Ketua,

**Mohamad Adam, S.H.I.**

NIP. 19811214.200704.1.001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI SETELAH REVIU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p align="center"><b>Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan</b></p> <hr/> <p align="center"><b>Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan</b>      <b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p align="center"><b>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</b></p> <hr/> <p align="center"><b>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan</b>      <b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"><b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera Dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p> <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<b>Catatan :</b>		
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</b>      <b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua,

**Mohamad Adam, S.H.I.**

NIP. 19811214.200704.1.001

